

# KLIPING BERITA MEDIA MASSA

Kamis, 19 Desember 2019



BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH  
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM  
DAN PERUMAHAN RAKYAT

## **KATA PENGANTAR**

Klipping Media Massa adalah kumpulan guntingan berita yang kami sajikan secara rutin. Guntingan berita ini kami seleksi dari berita yang muncul di media cetak. Adapun tema berita yang kami pilih adalah berita yang berkaitan dengan organisasi dan substansi Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan yang berkaitan dengannya.

Kami berharap klipping ini bermanfaat untuk monitoring media BPIW.

Hormat kami

Tim penyusun

## DAFTAR ISI

No	Media	Tanggal	News Title	Resume
1	Kompas Halaman 1	Kamis, 19 Desember 2019	Ujung Tol Layang Berpotensi Macet	Beberapa titik di Tol Layang Jakarta-Cikampek rawan macet. Sosialisasi yang lebih intensif dan pengaturan yang lebih baik di titik masuk dan keluar tol layang di perlakukan guna mencegah kemacetan dan mencegah terjadinya kecelakaan.
2	Kompas Halaman 1	Kamis, 19 Desember 2019	Ujung Tol Layang	Tbk M Agus Setiawan mengatakan, pengelola jalan tol sedang menyiapkan empat parking bay yang akan di pasang di tol layang untuk memudahkan pengendara yang beristirahat karena kondisi darurat. Namun, empat parking bay itu belum dipastikan akan terpasang saat libur Natal dan Tahun Baru.
3	Bisnis Indonesia Halaman 7	Kamis, 19 Desember 2019	Anak Usaha WSKT Incar Proyek Air Minum	PT Waskita karya Infrastruktur, anak usaha PT Waskita Karya (Persero)Tbk. (WSKT) membidik proyek penyediaan air minum di Kalimantan Timur. Perseroan menjajaki kerja sama dengan perusahaan asing untuk menggarap proyek tersebut.
4	Bisnis Indonesia Halaman 7	Kamis, 19 Desember 2019	Wiskita Akan Biayai Proyek Baru	Direktur Utama PT Waskita Toll Road (WTR) herwidiakto mengatakan bahwa divestasi merupakan strategi bisnis perusahaan antara lain untuk mendukung penyelesaian sejumlah ruas tol proyek strategis nasional dan investasi nasional dan investasi ruas tol baru lainnya.
5	Bisnis Indonesia Halaman 7	Kamis, 19 Desember 2019	Lalu Lintas Jalan Tol Japek Meningkatkan 5,8%	PT Jasa MARGA (Persero) Tbk.mencatat kenaikan arus lalu lintas di jalan tol Jakarta-Cikampek seiring dengan pengoperasian jalan tol layang Jakarta-Cikampek pada 15 Desember.
6	Bisnis Halaman 9	Kamis, 19 Desember 2019	Pengembangan Pikir-Pikir Ikut Program DP Rp0	Pelaku bisnis properti mengapresiasi program rumah subsidi atau DP Rp0 untuk masyarakat. Namun, pengembangan belum tertarik untuk ikut serta dalam program tersebut.
7	Bisnis Indonesia Halaman 19	Kamis, 19 Desember 2019	BTN Salurkan KPR Menilai Rp9,3 Triliun	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.mencatat sudah menyalurkan kredit pemilikan rumah (KPR) untuk milenial via program KPR gaeesss senilai Rp9,3 triliun dalam setahun ke belakang
8	Bisnis Indonesia Halaman 23	Kamis, 19 Desember 2019	Himperra Usul Anggaran dari BPJS-TK Digencarkan	Anggaran pemerintah untuk memenuhi kebutuhan rumah bersubsidi dari fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan terbilang masih terbatas untuk tahun depan.

Judul	Ujung Tol Layang Berpotensi Macet	Tanggal	Kamis, 19 Desember 2019
Media	Kompas Halaman 1		
Resume	Beberapa titik di Tol Layang Jakarta-Cikampek rawan macet. Sosialisasi yang lebih intensif dan pengaturan yang lebih baik di titik masuk dan keluar tol layang di perlakukan guna mencegah kemacetan dan mencegah terjadinya kecelakaan.		

## LALU LINTAS

# Ujung Tol Layang Berpotensi Macet

JAKARTA, KOMPAS — Beberapa titik di Tol Layang Jakarta-Cikampek rawan macet. Sosialisasi yang lebih intensif dan pengaturan yang lebih baik di titik masuk dan keluar tol layang diperlukan guna mencegah kemacetan dan mencegah terjadinya kecelakaan.

Tol Layang Jakarta-Cikampek, yang diresmikan Presiden Joko Widodo pada 12 Desember 2019, membentang dari Cikunir di Bekasi hingga Karawang Barat, Jawa Barat. Jalan tol layang ini dibuka dengan tujuan mengurai kemacetan di Tol Jakarta-Cikampek, yang setiap hari dilalui 200.000 kendaraan. Tol layang sepanjang 38 kilometer itu membentang dari Km 9 hingga Km 50 di Tol Jakarta-Cikampek.

Kepala Seksi Patroli Jalan Raya Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri Ajun Komisaris Besar Dedy Suhartono di Jakarta, Rabu (18/12/2019), mengatakan, meski ada tol layang, kemacetan tetap rawan terjadi di Bekasi Timur sampai Karawang Barat.

"Daerah itu rawan kemacetan karena itu kawasan industri sehingga kendaraan besar banyak melintas. Selain itu, di Tol Jakarta-Cikampek juga masih ada pembangunan jalur kereta api cepat Jakarta-Bandung, kereta ringan cepat, dan Jalan Tol Cibitung-Cilincing. Jalan yang sebelumnya empat lajur menyempit menjadi tiga lajur," tutur Dedy.

Penelusuran *Kompas*, Selasa (17/12), salah satu titik rawan kemacetan dari arah Ja-



BACA JUGA **HLM 2**

karta berada di Km 9 atau titik masuk tol layang. Di lokasi itu, papan informasi petunjuk untuk berpindah ke Jalan Tol Layang Jakarta-Cikampek berukuran kecil dan sering kali tidak terpantau pengendara, terutama mobil kecil, karena terhalang kendaraan besar. Akibatnya, kendaraan yang ingin menaiki tol layang tidak punya cukup waktu untuk berpindah lajur.

Sebagian kendaraan golongan I dari Jakarta masih melaju di jalur kanan dan baru berpindah ke jalur kiri saat beberapa puluh meter menjelang jalur tol layang. Hal itu bisa menimbulkan kemacetan dan rawan kecelakaan.

Ichy (43), salah satu warga asal Muara Baru, Jakarta Utara, yang baru pertama kali mencoba tol layang itu, mengeluhkan kepadatan di sekitar Km 9 karena banyak kendaraan yang menghambat laju kendaraan lain saat akan berpindah ke tol layang.

"Sebelum naik ke tol layang, banyak mobil kecil yang terhalang. Kebanyakan bingung. Jadi, ada yang ambil di kanan, ada yang ambil di tengah. Papan petunjuk harus diperbanyak," katanya berharap.

Menurut Operation and

Maintenance Management Group Head PT Jasa Marga Persero Tbk Fitri Wiyanti, pengelola Jalan Tol Jakarta-Cikampek telah memasang rambu tol sesuai peraturan perambuan, yaitu 1 km sebelum jalur masuk tol layang. Rambu itu dinilai cukup sebagai petunjuk jalan. "Kami tetap akan evaluasi kalau itu kurang informatif," ucapnya.

### Area istirahat

Potensi kemacetan lainnya ada di titik keluar tol layang. Kecenderungan kendaraan untuk masuk ke tempat istirahat (*rest area*) di Km 50 setelah keluar tol layang bisa menimbulkan kemacetan. Sebab, kapasitas area istirahat itu hanya 80 kendaraan.

Untuk mencegah hal itu terjadi, pengelola tempat istirahat sudah menyiapkan rekayasa saat arus mudik libur Natal dan Tahun Baru. Jika penuh, lokasi istirahat itu akan ditutup dan kendaraan akan diarahkan ke area istirahat berikutnya di Km 57.

"Kami tak ingin *rest area* ini jadi biang kemacetan. Nanti saat puncak arus mudik Natal, waktu istirahat, yang biasanya maksimal dua jam, kami batasi paling lama 30 menit," kata salah seorang petugas di area istirahat Km 50, Yandi.

Sebelumnya, Sekretaris Perusahaan PT Jasa Marga

(Bersambung ke hlm 11 kol 6-7)

▶ [klik.kompas.id/jajaltoljapek](http://klik.kompas.id/jajaltoljapek)  
▶ [klik.kompas.id/arusmudik](http://klik.kompas.id/arusmudik)

Judul	<b>Ujung Tol Layang</b>	Tanggal	Kamis, 19 Desember 2019
Media	Kompas Halaman 1		
Resume	Tbk M Agus Setiawan mengatakan, pengelola jalan tol sedang menyiapkan empat <i>parking bay</i> yang akan di pasang di tol layang untuk memudahkan pengendara yang beristirahat karena kondisi darurat. Namun, empat <i>parking bay</i> itu belum dipastikan akan terpasang saat libur Natal dan Tahun Baru.		

## Ujung Tol Layang

(Sambungan dari halaman 1)

Tbk M Agus Setiawan menyatakan, pengelola jalan tol sedang menyiapkan empat *parking bay* yang akan dipasang di tol layang untuk memudahkan pengendara yang beristirahat karena kondisi darurat. Namun, empat *parking bay* itu belum dipastikan akan terpasang saat libur Natal dan Tahun Baru.

"*Parking bay* itu untuk istirahat darurat. Harapannya kendaraan golongan I melintas dalam kondisi baik sehingga perjalanan melintasi tol layang sepanjang 38 km itu seharusnya aman. Dengan demikian, harapannya *parking bay* tidak sampai digunakan," katanya.

Adapun untuk mencegah atau menanggulangi kemacetan, lanjut Dedy, Korlantas Polri sudah memastikan kelengkapan personel serta sarana dan prasarana di jalan tol itu. Setidaknya ada delapan putaran balik di tol layang sebagai pintu evakuasi untuk rekayasa lalu lintas, termasuk saat terjadi kecelakaan.

Ketua Umum Masyarakat Transportasi Indonesia Agus Taufik Mulyono berpendapat, pemangku kepentingan juga perlu lebih banyak menjalankan sosialisasi agar peraturan dipatuhi. Contohnya, aturan soal batas kecepatan berkendara guna memastikan keselamatan berkendara dan mencegah kemacetan. (VAN/ERK)

Judul	Anak Usaha WSKT Incar Proyek Air Minum	Tanggal	Kamis, 19 Desember 2019
Media	Bisnis Indonesia Halaman 7		
Resume	PT Waskita karya Infrastruktur, anak usaha PT Waskita Karya (Persero) Tbk. (WSKT) membidik proyek penyediaan air minum di Kalimantan Timur. Perseroan menjajaki kerja sama dengan perusahaan asing untuk menggarap proyek tersebut.		

## ► IBU KOTA NEGARA

# Anak Usaha WSKT Incar Proyek Air Minum

Bisnis, JAKARTA — PT Waskita Karya Infrastruktur, anak usaha PT Waskita Karya (Persero) Tbk. (WSKT) membidik proyek penyediaan air minum di Kalimantan Timur. Perseroan menjajaki kerja sama dengan perusahaan asing untuk menggarap proyek tersebut.

Direktur Utama PT Waskita Karya Infrastruktur (WKI) Eko Widianto mengatakan bahwa sektor air minum menjadi salah satu bidang usaha infrastruktur yang sedang dirintis oleh perseroan.

Dia menyebutkan bahwa ekspansi ke sektor air minum dilakukan seiring dengan rencana pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur.

“Kami mau ngejar yang di IKN [ibu kota negara]. Itu kan kapasitasnya bisa besar, kami mungkin tidak sendirian,” ujarnya kepada *Bisnis*, Rabu (18/12).

Eko menerangkan bahwa pihaknya telah menyiapkan konsep yang ada di bawah tanah (underground) terkait dengan rencana ekspansi ke wilayah ibu kota baru. Namun, WKI masih menunggu kepastian desain ibu kota baru yang terletak di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam

Passer Utara.

Dia menambahkan bahwa pihaknya belum bisa memperkirakan kebutuhan investasi untuk menggarap proyek sistem penyediaan air minum (SPAM) di Kalimantan Timur. Kendati demikian, nilai investasi diperkirakan lebih mahal dibandingkan dengan proyek SPAM biasa.

Pasalnya, ibu kota negara akan masuk zona air minum prima yang mana air yang diproduksi bisa langsung diminum.

Eko mengungkapkan bahwa pihaknya menjajaki kerja sama dengan perusahaan asing dalam penggunaan teknologi air siap minum.

“Kami sedang penajakan dengan Singapura untuk bisa [menerapkan teknologi] langsung *drinking water*.”

Sebelumnya, Ketua Umum Persatuan Perusahaan Air Minum Indonesia (Perpamsi) Benny Andrianto mengatakan bahwa syarat yang paling sulit untuk dipenuhi PDAM dalam menciptakan zona air minum prima adalah kontinuitas.

“Yang dimaksud ZAMP [zona air minum prima] itu seharusnya air mengalir 24 jam nonstop. Kalau air sempat berhenti dengan berbagai

alasan, itu tidak bisa disebut zona air minum prima,” ujarnya kepada *Bisnis*, beberapa waktu lalu.

Desain ibu kota negara akan ditetapkan pada tahun depan. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melansir bahwa pemerintah juga membuka keran penanaman modal dari investor guna membiayai pembangunan ibu kota negara.

Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR Danis H. Sumadilaga sebelumnya mengatakan bahwa skema pembiayaan di luar anggaran pemerintah tengah digodok dan akan merujuk pada regulasi baru yang juga tengah disusun.

“Bisa *direct investment*. Itu dimungkinkan. Kami sudah bagi-bagi mana yang kemungkinan pakai government spending, mana yang bisa KPBU [kerja sama pemerintah dengan badan usaha],” tuturnya.

Dia menambahkan bahwa pembiayaan dari anggaran negara diproyeksi hanya 19% dari kebutuhan investasi. Selebihnya, pemerintah berharap partisipasi badan usaha baik dalam bentuk kerja sama maupun investasi langsung. *(Rivki Maulana)*

Judul	Waskita Akan Biayai Proyek Baru	Tanggal	Kamis, 19 Desember 2019
Media	Bisnis Indonesia Halaman 7		
Resume	Direktur Utama PT Waskita Toll Road (WTR) Herwidiakto mengatakan bahwa divestasi merupakan strategi bisnis perusahaan antara lain untuk mendukung penyelesaian sejumlah ruas tol proyek strategis nasional dan investasi nasional dan investasi ruas tol baru lainnya.		

► DIVESTASI SAHAM TOL

# Waskita Akan Biayai Proyek Baru

Bisnis, JAKARTA — PT Waskita Toll Road baru saja melakukan divestasi pada dua ruas tol yakni Solo—Ngawi dan Ngawi—Kertosono—Kediri. Penjualan konsesi senilai Rp2,5 triliun akan digunakan perusahaan antara lain untuk mendanai proyek-proyek infrastruktur baru.

Aprianus Doni Tolok  
redaksi@bisnis.com

Direktur Utama PT Waskita Toll Road (WTR) Herwidiakto mengatakan bahwa divestasi merupakan strategi bisnis perusahaan antara lain untuk mendukung penyelesaian sejumlah

ruas tol proyek strategis nasional dan investasi ruas tol baru lainnya. "Setelah tol beroperasi kan pasti mengalami gap minus, tapi kami harus setoran ke pemegang saham. Sebagian dari situ [Rp2,5 triliun]. Sebagian lagi kami mau masuk di tol [Jembatan] Teluk Balikpapan, itu

untuk modal di sana," ujarnya, Rabu (18/12).

Divestasi pada empat ruas tol lainnya pun sudah masuk dalam rencana Waskita pada tahun depan.

Herwi menyebutkan bahwa empat ruas tol tersebut adalah Kanci—Pejagan, Pejagan—Pemalang, dan Pasuruan—Probolinggo, sedangkan satu ruas tol lagi akan dipilih antara Medan—Kualanamu, Semarang—Batang, dan Pemalang—Batang.

"Sudah ada 7 sampai 10 investor yang ingin masuk di tiga ruas [yakni] Kanci—Pejagan, Pejagan—Pemalang, dan Pasuruan—Probolinggo. Investor-investor tersebut campuran antara swasta lokal dan asing," katanya.

Dia menargetkan pada April 2020 bisa dilakukan penandatanganan

perjanjian jual beli pada tiga ruas tol tersebut.

Untuk saat ini, lanjut Herwi, Waskita tengah memilah mana saja investor swasta terbaik yang akan membeli konsesi tiga ruas tol tersebut.

## RUAS BARU

Pada kesempatan berbeda, Herwi memperkirakan lima ruas jalan tol bakal rampung pada Maret 2020. Satu ruas jalan tol juga tengah disiapkan untuk beroperasi secara terbatas atau fungsional pada masa angkutan Natal 2019 dan Tahun Baru 2020.

Herwi mengatakan bahwa jadwal penyelesaian empat jalan tol mundur dari rencana semula karena terganjal pembebasan lahan.

Bidang lahan yang belum bebas

## ► Lima ruas tol milik PT Waskita Toll Road bakal rampung pada Maret 2020.

berlokasi di titik-titik yang terpisah sehingga jalan tol belum bisa tersambung secara penuh.

"Karena spot-spot tanah ada yang belum bebas, kami enggak bisa connect karena terhalang [lahan yang belum bebas]. Kalau tanah sudah bebas, konstruksi bisa dikerjakan dengan cepat," jelasnya kepada *Bisnis*, Selasa (17/12).

Dia menjabarkan lima ruas yang akan rampung pada Maret 2020 yaitu Kayu Agung—Palembang—Betung (Kapal Betung) seksi 1, Cimanggis—Cibitung seksi 1, Cibitung—Cilincing seksi 1, Krian—Legundi—Bunder—Manyar seksi 1—3, dan Bekasi—Cawang—Kampung Melayu (BecaKayu) seksi 1A.

Data Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) yang dihimpun *Bisnis* menunjukkan bahwa panjang gabungan dari jalan tol yang dioperasikan oleh WTR mencapai 81,83 kilometer.

Herwidiakto mengatakan bahwa jadwal penyelesaian sebagian ruas jalan tol pada Maret 2020 secara langsung akan menambah panjang jalan tol yang beroperasi.

Sejauh ini, WTR telah mengoperasikan 529 kilometer di 11 ruas jalan tol. Panjang tersebut separuh dari total panjang konsesi yang dimiliki WTR sejauh 1.015 kilometer, tersebar di 18 ruas. Kepemilikan WTR di 18 ruas tersebut bervariasi, mulai dari mayoritas hingga minoritas.

Secara khusus, WTR akan mengoperasikan jalan tol Kapal Betung seksi 1 pada masa angkutan Natal dan Tahun Baru atau Nataru.

Data pemantauan BPJT menunjukkan bahwa progres fisik jalan tol Kapal Betung seksi 1 telah mencapai 96,74%. (Rivki Maulana) 2

## Kiprah Waskita Toll Road di Jalan Tol

Ruas yang Diakuisisi	Panjang (km)	Entitas*	Tahun Akuisisi	Nilai Akuisisi dan atau Penyertaan (Rp miliar)
Kanci—Pejagan	35	Semesta Marga Raya (SMR)	2015	347,27
Pejagan—Pemalang	57,5	Pejagan Pemalang Toll Road (PPTR)	2015	350
Pasuruan—Probolinggo	31,3	Trans Jawa Paspro Jalan Tol (TPJT)	2015	71,99
Pemalang—Batang	39,2	Pemalang Batang Toll Road (PBTR)	2016	220
Bekasi—Cawang—Kampung Melayu	16,02	Kresna Kusuma Dyandra Marga (KKDM)	2015	240
Cimanggis—Cibitung	26,5	Cimanggis Cibitung Tollways (CCT)	2015	551,25
Ciawi—Sukabumi	54	Trans Jabar Tol (TJT)	2015	944,51
Kayu Agung—Palembang—Betung	111,7	Waskita Sriwijaya Tol	2016–2018	617,7
Cibitung—Cilincing	34,7	Cibitung Tanjung Priok Port Tollways (CTP)	2017	715
Krian—Legundi Bunder	38,3	Waskita Bumi Wira (WBW)	2014–2018	1.268,69
Ruas yang Diakuisisi	Panjang (km)	Entitas*	Tahun Akuisisi	Nilai Akuisisi dan atau Penyertaan (Rp miliar)
Waskita Transjawa Toll Road (WTTR)**	-	Kanci—Pejagan Pejagan—Pemalang Pasuruan—Probolinggo	2018	5.000

Sumber: Kementerian PUPR  
BISNIS/TRI UTOMO

Ket: \*Sejumlah entitas mengalami perubahan nama setelah akuisisi.  
\*\*Pada 2015 dilakukan inbreng saham SMR, PPTR, dan TPJT ke WTTR.  
Pada 2018 WTR melepas 70% saham WTTR ke RDPT.

Judul	<b>Lalu Lintas Jalan Tol Japek Meningkat 5,8%</b>	Tanggal	Kamis, 19 Desember 2019
Media	Bisnis Indonesia Halaman 7		
Resume	PT Jasa Marga (Persero) Tbk.mencatat kenaikan arus lalu lintas di jalan tol Jakarta-Cikampek seiring dengan pengoperasian jalan tol layang Jakarta-Cikampek pada 15 Desember.		

## ► PENGOPERASIAN TOL LAYANG

# Lalu Lintas Jalan Tol Japek Meningkat 5,8%

Bisnis, JAKARTA — PT Jasa Marga (Persero) Tbk. mencatat kenaikan arus lalu lintas di jalan tol Jakarta—Cikampek seiring dengan pengoperasian jalan tol layang Jakarta-Cikampek pada 15 Desember.

Corporate Communication and Community Development Group Head PT Jasa Marga Tbk. Dwimawan Heru mengatakan bahwa pengoperasian jalan tol layang Jakarta—Cikampek disambut baik oleh pengguna jalan tol. Hal ini tercermin dari arus lalu lintas yang ramai di jalan tol tersebut.

Berdasarkan hasil evaluasi sementara, pada rentang waktu sore hari, jumlah pengguna jalan tol layang Japek di ruas Jalur B (Karawang—Cikunir) mencapai lebih dari 2.600 kendaraan per jam.

Sementara itu, dari arah sebaliknya Jalur A (Cikunir—Karawang), mencapai di atas

1.800 kendaraan per jam.

“Kondisi lalin ramai lancar, dari data terlihat vehicle/capacity ratio, di Jalur A mencapai 0,4 dan di jalur B mencapai hampir 0,6,” ujar Heru melalui siaran pers, Rabu (18/12).

Jalan tol layang Japek telah dioperasikan untuk umum khusus kendaraan Golongan I (nonbus dan nontruk) sejak 15 Desember 2019. Pengguna jalan tol belum dipungut tarif saat melintasi jalan bebas hambatan sepanjang 38 kilometer tersebut.

Pengoperasian jalan tol layang Japek memicu kenaikan lalu lintas pada ruas jalan tol Jakarta—Cikampek sebesar 5,8%. Arus lalu lintas naik dari lalu lintas harian rata-rata (LHR) 413.000 kendaraan menjadi 437.000 kendaraan.

Kenaikan yang cukup signifikan tercatat di beberapa gerbang tol seperti GT Karawang

Timur, GT Kalihurip Utama 1, dan GT Cikampek Utama 1.

Dia menekankan bahwa evaluasi pengoperasian jalan tol layang Japek masih bersifat sementara. Jasa Marga, lanjut Heru, bakal terus melakukan evaluasi kinerja pencapaian target lalu lintas di jalan tol tersebut. “Kami persilakan pengguna jalan mencoba Japek Elevated, dengan tetap mematuhi peraturan dan menjaga ketertiban lalu lintas.”

Sebelumnya, pendiri DSD Road Safety Consultant Eko Reksodipuro mengatakan bahwa dengan kondisi jalan tol layang yang bergelombang, laju kendaraan 60 kilometer—80 kilometer per jam atau sesuai dengan standar yang diberlakukan di tol layang Jakarta—Cikampek dijamin keamanannya, tetapi dari segi kenyamanan pasti agak berkurang. *(Aprianus D. Tolok/Rivki Maulana)*

Judul	Pengembangan Pikir-Pikir Ikut Program DP Rp0	Tanggal	Kamis, 19 Desember 2019
Media	Bisnis Halaman 9		
Resume	Pelaku bisnis properti mengapresiasi program rumah subsidi atau DP Rp0 untuk masyarakat. Namun, pengembangan belum tertarik untuk ikut serta dalam program tersebut.		

## ► PERUMAHAN RAKYAT

# Pengembang Pikir-Pikir Ikut Program DP Rp0

Bisnis, JAKARTA — Pelaku bisnis properti mengapresiasi program rumah subsidi atau DP Rp0 untuk masyarakat. Namun, pengembang belum tertarik untuk ikut serta dalam program tersebut.

Ketua DPD Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) DKI Jakarta Amran Nukman mengatakan bahwa langkah Pemprov DKI menalangi uang muka dan menyubsidi bunga kredit semata-mata stimulus kepada pembeli, bukan untuk pelaku usaha.

Menurutnya, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi Gubernur DKI Anies Baswedan jika ingin mengajak pengembang ikut serta dalam program DP Rp0.

“Yang paling sederhana, sebaiknya lahan disiapkan pemerintah. Lokasi di mana terserah saja. Kalau dibebankan ke pengembang untuk memperoleh lahan pasti sulit karena harganya terlalu ma-

hal,” katanya ketika dimintai konfirmasi, Rabu (18/12).

Amran memaparkan harga lahan di Jabodetabek, jika mengacu pada harga jual komersial, berkisar Rp10 juta/meter persegi. Padahal, harga lahan yang pantas dibeli untuk program rumah subsidi setidaknya di bawah Rp5 juta/meter persegi.

Jika mengacu pada data tersebut, dia memperkirakan pengembang baru bisa menjual unit rumah susun sederhana milik di kawasan Jabodetabek dengan harga Rp600 juta per unit. Padahal, Pemprov DKI menjual unit rumah Samawa DP Rp0 tahap I Klapa Village di Pondok Kelapa senilai Rp200 juta—Rp350 juta per unit.

Menurutnya, permasalahan ketersediaan lahan pernah disampaikan kepada mantan Wagub DKI Jakarta Sandiaga Uno. Namun, problem tersebut ternyata belum bisa diselesaikan hingga saat ini.

“Kira-kira 2 tahun lalu kami membuat kerja sama dengan Pak Wagub Sandiaga Uno di Balai Kota. Kami sudah sampaikan ini bukan program pengembang, melainkan Pemprov DKI. Ya, soal penyediaan lahan,” ungkapnya.

Selain soal tanah, Amran juga meminta agar Pemprov DKI mempercepat penyelesaian semua tahap perizinan pembangunan properti. Pasalnya, dia sering mendapat keluhan dari pelaku usaha karena proses perizinan tetap memakan waktu dan biaya yang cukup besar.

Terakhir, Amran menilai program DP Rp0 sebenarnya tidak berbeda dengan skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Oleh karena itu, dia menyambut rencana Gubernur Anies untuk mempermudah syarat-syarat yang dibebankan kepada masyarakat. *(Feni Freycinetia)*

Judul	BTN Salurkan KPR Menilai Rp9,3 Triliun	Tanggal	Kamis, 19 Desember 2019
Media	Bisnis Indonesia Halaman 19		
Resume	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.mencatat sudah menyalurkan kredit pemilikan rumah (KPR) untuk milenial via program KPR gaeesss senilai Rp9,3 triliun dalam setahun ke belakang		

## ► KREDIT PERUMAHAN

# BTN Salurkan KPR Milenial Rp9,3 Triliun

Bisnis, JAKARTA — PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. mencatat sudah menyalurkan kredit pemilikan rumah (KPR) untuk milenial via program KPR Gaeesss senilai Rp9,3 triliun dalam setahun ke belakang.

Nilai penyaluran KPR Gaeesss ini setara dengan pembiayaan untuk 27.593 hunian. Menurut Direktur Utama BTN Pahala N. Mansury, ke depan perseroan menargetkan penyaluran KPR khusus milenial bisa mencapai Rp11 triliun.

“Kami membidik dengan *relaunching* KPR Gaeesss For Millenials dan *launching* aplikasi BTN Properti Mobile dapat meningkatkan penyaluran KPR tersebut mencapai kurang lebih Rp11 triliun,” kata Pahala di peluncuran aplikasi khusus pengajuan KPR dan *relaunching* KPR Gaeesss, Jakarta, Rabu (18/12) malam.

Dia menyebut perseroan siap menguasai pasar pembiayaan hunian untuk milenial dengan adanya aplikasi baru ini. Kehadiran aplikasi BTN

memungkinkan nasabah mengajukan KPR langsung dari gawai mereka.

Aplikasi khusus ini sengaja diluncurkan BTN karena perseroan melihat potensi besar dari generasi milenial yang belum memiliki rumah. Data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyebut ada 81 juta orang di segmen generasi milenial yang belum memiliki rumah. Angka tersebut setara 31% dari jumlah populasi di Indonesia.

“Sebagai pemimpin pasar KPR di Tanah Air, kami akan terus berinovasi untuk menyediakan hunian yang mudah diakses dan terjangkau bagi masyarakat Indonesia. Kali ini kami berinovasi dengan menyajikan aplikasi BTN Properti Mobile yang memberikan berbagai kemudahan berbasis teknologi bagi generasi milenial yang *tech-savvy*,” ujarnya.

Ada berbagai fitur BTN Properti Mobile yang dapat dinikmati milenial. Di antaranya, aplikasi tersebut

memiliki fitur 4D Tour Services yang membuat penggunaanya dapat melihat unit rumah tanpa harus ke lokasi.

Fitur lain yang ditawarkan yakni *tracking* pengajuan kredit secara *real time* sehingga dapat mengetahui status permohonan kredit.

BTN juga menawarkan fasilitas *booking/fee payment* melalui *e-channel* lewat aplikasi ini. Melalui aplikasi tersebut, pengguna dapat melihat kondisi fasilitas umum di sekitar unit rumah.

Calon debitur juga bisa mengajukan permohonan KPR secara *online* melalui aplikasi BTN Properti Mobile Apps ini dan juga melalui situs *www.btrproperti.co.id*. Dalam situs tersebut, calon debitur bisa memilih hunian dari 507.445 unit properti milik sekitar 1.800 developer.

BTN juga sengaja melakukan *relaunching* Program KPR Gaeesss For Millenials agar lebih sesuai dengan karakteristik kaum milenial, yakni ingin layanan yang mudah diakses dan cicilan yang terjangkau. (Lalu Rahadian)

Judul	Himperra Usul Anggaran dari BPJS-TK Digencarkan	Tanggal	Kamis, 19 Desember 2019
Media	Bisnis Indonesia Halaman 23		
Resume	Anggaran pemerintah untuk memenuhi kebutuhan rumah bersubsidi dari fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan terbilang masih terbatas untuk tahun depan.		

► **RUMAH BERSUBSIDI**

# Himperra Usul Anggaran dari BPJS-TK Digencarkan

Bisnis, JAKARTA — Anggaran pemerintah untuk memenuhi kebutuhan rumah bersubsidi dari fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan terbilang masih terbatas untuk tahun depan.

Kementerian PUPR tidak menutup kemungkinan untuk mengakomodasi suara dari pengembang maupun perbankan agar anggaran bisa disesuaikan.

Ketika menjawab hal tersebut, Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) mengusulkan agar pemerintah mengencarkan kredit pemilikan rumah dari iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS-TK).

Menurut Ketua Umum Himperra Endang Kawidjaja, iuran BPJS-TK bisa menambah anggaran fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) dalam

jumlah yang cukup banyak. Endang menjabarkan realisasi iuran BPJS-TK mencapai 70%, artinya banyak pengguna yang patuh akan pembayaran iuran.

“Kebanyakan dari mereka [debitur] *kan* pekerja pabrik, notabene adalah anggota yang pasti bayar BPJS-TK. Padahal selama ini, sekitar 70% pembeli rumah subsidi skema KPR [Kredit Pemilikan Rumah] FLPP dananya berasal dari pemerintah [APBN] itu adalah anggota BPJS-TK,” jelasnya, Selasa (17/12).

Adapun, Endang menyebutkan bahwa saat ini dana di BPJS-TK yang dipastikan bisa digunakan untuk KPR rumah subsidi baru 5%. Meskipun demikian, menurutnya, jumlah tersebut sudah cukup.

“Kalau melihat realisasi BPJS-TK tahun 2018 *kan* mencapai sekitar Rp385 tri-

liun, 5%-nya sekitar Rp19 triliun, itu sudah dua kali FLPP dari APBN. Kalau bisa diwujudkan, *enggak* usah *segitu*, disamakan Rp9 triliun sama dengan anggaran pemerintah saja pengembang sudah bahagia,” ujarnya.

Selain dengan dana BPJS-TK, Himperra juga mengusulkan penambahan anggaran unit FLPP lewat peningkatan pembangunan program bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) berbasis komunitas, namun untuk pembangunan baru.

Himperra mengusulkan agar program itu ditujukan bagi kelompok sasaran UMR di bawah Rp2 juta. Mekanismenya antara lain lahannya menjadi tanggung jawab pengembang yang pembeliannya lewat perbankan, sedangkan bangunan rumahnya dibantu oleh pemerintah. *(Mutiar Nabila)*